

**IMPLIKASI PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL  
TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL**

**DI INDONESIA**

**STUDI KASUS : PAJAK PENGHASILAN GOOGLE**

**DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh:**

**Reni Arlyan**

**2016891001**

**Pembimbing :**

**Sapta Dwikardana, Ph.D.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**24 OKTOBER 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**



**IMPLIKASI PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL TERHADAP  
KEBIJAKAN FISKAL**

**DI INDONESIA**

**STUDI KASUS: PAJAK PENGHASILAN GOOGLE DI INDONESIA**



**Oleh :**

**Reni Arlyan**

**2016891001**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:**

**Rabu, 24 Oktober 2018**

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sapta Dwikardana'.

**Sapta Dwikardana, Ph.D**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

**24 OKTOBER 2018**



## Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Reni Arlyan  
No Pokok Mahasiswa : 2016891001  
Program Studi : Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul :

**“ Implikasi Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Kebijakan Fiskal  
Di Indonesia”**

**Studi Kasus : Pajak Penghasilan Google Di Indonesia**

Adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Oktober 2018



**IMPLIKASI PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL TERHADAP  
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA**

**STUDI KASUS: PAJAK PENGHASILAN GOOGLE DI INDONESIA**

**Reni Arlyan (NPM: 2016891001) Pembimbing: Sapta Dwikardana, Ph.D.**

**Magister Ilmu Hubungan Internasional**

**Bandung**

**Oktober 2018**

**ABSTRAK**

Perkembangan globalisasi ekonomi di abad-21 telah meningkatkan signifikansi hubungan antara teknologi, informasi, dan komunikasi dalam sistem ekonomi. Kemunculan era ekonomi digital telah memberikan tantangan bagi negara dalam kebijakan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan globalisasi dan revolusi industri ke empat yang membuat perkembangan pesat dari bisnis internasional sehingga memicu hadirnya aktor-aktor baru khususnya dalam perubahan defenisi *Multinational Corporations* (MNC) di era digitalisasi yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan fiskal di Indonesia dengan membahas studi kasus yang terjadi pada proses pemajakan pada Google yang beroperasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis dokumen dan studi kasus. Pemajakan Google di beberapa negara membuat pemerintah Indonesia mulai melirik pajak penghasilan Google di Indonesia, oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan serangkaian upaya dalam penyesuaian kebijakan fiskal terkait dengan pemungutan pajak penghasilan melalui surat-surat keputusan penegasan yaitu Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak No. SE-04/PJ/2017 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika RI No. 3 Tahun 2006 yang mengharuskan perusahaan multinasional yang bekerja di sektor digital untuk menjadi wajib pajak dengan penetapan status Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga dapat dipajaki oleh negara.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Kebijakan Fiskal, Globalisasi, Penyesuaian Kebijakan, MNC.

# **THE IMPLICATIONS OF DIGITAL ECONOMY ON FISCAL POLICY IN INDONESIA**

## **CASE STUDY: GOOGLE'S TAX INCOME IN INDONESIA**

**Reni Arlyan (NPM: 2016891001) Adviser: Sapta Dwikardana, P.hD**

**Magister of International Relations**

**Bandung**

**October 2018**

### **ABSTRACT**

The development of economic globalization in the 21st century has increased the significance of the relationship between technology, information and communication in the economic system. The emergence of the digital economy era has provided challenges for the state in national economic policy. This research aims to describe the development of globalization and the fourth industrial revolution that makes the rapid development of international business so that it triggers the presence of new actors, especially to changing definition of Multinational Corporations (MNC) in digitization era that affect the adjustment of fiscal policy in Indonesia by discussing case studies that happen in the taxation process on Google operating in Indonesia. This research use descriptive qualitative methods that use document analysis and case studies. Google taxation in several countries makes the Indonesian government begin to look at Google's income tax in Indonesia, therefore the Indonesian government provides a series of efforts in adjustment fiscal policies related to collection of tax income and issuance of affirmation decisions namely Ministry of Finance Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-04 / PJ / 2017 (*Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak No. SE-04/PJ/2017*) and Indonesian Minister of Communication and Information Circular Letter No. 3 of 2006 (*Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika RI No. 3 Tahun 2006*) which contained that multinational companies working that in the digital sector become taxpayers with status determination *Badan Usaha Tetap* (BUT) so that it can be taxed by the state.

Keywords: Digital Economy, Fiscal Policy, Policy Adjustment, Globalization, MNC.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan-Nya, berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulisan tesis yang berjudul ***“IMPLIKASI PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA. STUDI KASUS: PAJAK PENGHASILAN GOOGLE DI INDONESIA”*** dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar master ( S-2) dalam program studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penyusunan tesis ini senantiasa dihadapkan dengan segala macam hambatan, tantangan, dan gangguan. Namun semua itu dapat teratasi dengan kesabaran, ketabahan dan keyakinan yang tinggi, sehingga Alhamdulillah tesis ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang turut membantu dalam terwujudnya tesis ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Sapta Dwikardana. Ph.D selaku pembimbing penulis yang memberikan arahan dan keilmuannya selama penulisan tesis ini.
2. Dr.phil.Aknolt Kristian Pakpahan, Dr.Adelbertus Irawan J. Hartono selaku pembahas dalam tesis ini.

3. Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional yaitu Dr. I Nyoman Sudira.
4. Dosen-dosen Pascasarjana Magister Hubungan Internasional yaitu pak Prof.V.Bob Sugeng Hadiwinata. Ph.D, pak Yulius Purwadi Hermawan. Ph.D, Sukawarsini Djelantik, Ph.D, Adrianus Harsawaskita. MA., Ratih Indraswari, MA, Albert Triwibowo, M.A, dan Stanislaus Risadi Apresian, M.A.dll
5. Staf Administrasi FISIP dan Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
6. Staf Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
7. Staf *Center for Indonesian Tax Analysis* (CITA).
8. My Brother Rizal Bado yang selalu memberikan perhatian dan cinta kasihnya terhadap penulis.
9. Sahabat terbaikku Dewi Ratna Sari, S,H,M.H dan Eni Susilowati, S.Ak, M.M yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama pengerjaan tesis ini.
10. Sahabat pertama ketika di Pascasarjana UNPAR Yovita Dhevi .S, You are my best friend. Dan Sahabat sepenanggungan Mia Damayanti Fajar dan Dyah, yang selalu memberi dukungan terhadap penulis.
11. Sahabat-Sahabat Pascasarjana Hubungan Internasional yaitu Amel, Rivo, Kak Angga, Kak Iyan, Randy, Kak Aurora, Kak Dhea, Kak Cindy, Hedi, Kak Wahid, Trina, Heli, Jelena, Kak Ari, serta Mba Lea. Yang selalu memberi motivasi penulis.

12. Sahabat terbaik di Widuri Astrid Olivia Nandika, M.Si serta Geng Kosan Widuri.

13. Serta orang-orang yang tidak sempat disebutkan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari dalam pengerjaan tesis ini banyak hambatan-hambatan yang dilalui, namun karena motivasi dan saran-saran dari berbagai pihak, maka penulis merasa bisa melewati semuanya itu. Akhirnya dengan berserah diri kepada sang pencipta Allah SWT, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya khususnya di bidang ilmu hubungan internasional.

Reni Arlyan

2016891001



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**ABSTRAK**

*ABSTRACT*

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	17
1.2.2. Perumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	18
1.3.3. Manfaat Penelitian.....	18
1.4. Landasan Teori.....	20
1.5. Kerangka Pemikiran.....	37
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
1.5.1. Metode Penelitian.....	38
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1.6. Sistematika Pembahasan.....	41

**BAB 2 GLOBALISASI : REVOLUSI TEKNOLOGI, INFORMASI,  
KOMUNIKASI DAN KEMUNCULAN ERA EKONOMI  
DIGITAL**

2.1. Globalisasi.....	44
2.1.1. Globalisasi Ekonomi.....	45
2.2. Revolusi Industri Ke Empat (Revolusi Digital).....	50
2.3. Kehadiran Internet Dalam Era Digital.....	54
2.4. Kemunculan Era Ekonomi Digital.....	59
2.5. Multinational Corporations, Bisnis Digital dan Model Bisnis Berbasis Web.....	64
2.5.1. Bisnis Digital.....	70
2.5.2. Model Bisnis Berbasis Web.....	72
2.5.3. Produk Digital.....	75

**BAB 3 GOOGLE SEBAGAI AKTOR BARU DALAM BISNIS  
INTERNASIONAL**

3.1. Google.....	82
3.4. Produk-Produk Bisnis Google.....	92

## **BAB 4 ANALISIS PENYESUAIAN KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN**

### **BADAN USAHA MULTINASIONAL DI INDONESIA**

4.1. Badan Usaha Tetap (BUT).....	107
4.2. Ketentuan OTT.....	110
4.3. Analisis Penyesuaian Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Badan Usaha Multinasional Di Sektor Digital.....	111
4.4. Kasus Pemajakan Google.....	114
4.5. Analisis Kasus Pemajakan Penghasilan Google Di Indonesia.....	117

## **BAB 5 KESIMPULAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cabang Besar Ilmu Kebijakan	24
Gambar 1.2 Bentuk Kebijakan Publik	26
Gambar 1.3 Elemen Sistem Kebijakan	29
Gambar 2.1 Pengguna Yang Terkoneksi Dengan Internet	57
Gambar 2.2 Internet Sebagai Kegiatan Berbasis Jaringan Baru	62
Gambar 4.1 Pertumbuhan Pengguna Internet	104
Gambar 4.5 Pengguna <i>Browser</i> di Indonesia	118
Gambar 4.6 Pengguna Perangkat <i>E-Mail</i>	119

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan	29
Tabel 2.1 <i>Globalization: Then Vs Now</i>	49
Tabel 2.2 Pengkategorian Model Bisnis	73
Tabel 3.1 Peristiwa Penting Google	90
Tabel 4.1 Responden Pengguna Internet di Indonesia	104
Tabel 4.2 Pembagian Kategori Pengguna Internet	105
Tabel 4.3 Skema Perpajakan Sektor Ekonomi Digital	111

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran era globalisasi membuat peran ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Adanya kemajuan di bidang ini telah membawa perubahan-perubahan yang mendasar pada pola pembelajaran serta aktivitas pengetahuan manusia khususnya dalam pola pengkajian ilmu ekonomi politik internasional.

Perubahan teknologi dan komunikasi berdampak signifikan terhadap evolusi dan karakter masyarakat serta politik pada tingkat dunia, hal tersebut dikarenakan pemberdayaan kelompok sosial tertentu terhadap kelompok lain yang mengubah distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat kognisi sosial, nilai dan kepercayaan. Semua transformasi-transformasi yang terjadi erat kaitannya dengan perubahan biaya atau dampak dari suatu kebijakan tertentu, sehingga pada gilirannya akan mengubah hubungan struktural antara elemen ekonomi politik internasional yang ada<sup>1</sup>.

Globalisasi merupakan penyebaran dan intersifikasi dari ekonomi, sosial, dan budaya dalam lintas batas internasional. Hal ini memang berarti bahwa globalisasi mencakup hampir segala aspek baik itu menyangkut bidang ekonomi, politik, teknologi, komunikasi, dan lainnya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ronald Deibert, *Parchment, Printing, and Hypermedia: Communication in World Order Transformation* (New York: Columbia University Press, 1995), 2-3.

<sup>2</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth Edition, terj. Dadan Suryadioura dan Pancasari Suryatiman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 342.

Salah satu aspek yang hadir akibat dari globalisasi ekonomi adalah *Knowledge Economy* yang memberikan hubungan signifikan antara perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi terhadap perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Seiring dengan dengan perkembangan ini maka tidak menutup kemungkinan akan muncul fenomena-fenomena lainnya yang dapat menyajikan lebih luas hubungan antara teknologi dan aspek ekonomi. Salah satunya adalah kemunculan era ekonomi digital.

Ekonomi digital merupakan fenomena yang muncul akibat dari perubahan inovasi teknologi dan komunikasi yang berdampak pada ekonomi bahkan politik dalam suatu negara. Ekonomi digital telah memberikan keanekaragaman dalam proses kemunculannya, namun hal ini tidak dapat diprediksikan efeknya terhadap masyarakat. Selain terhadap ekonomi, digitalisasi juga dapat berdampak pada aliran transformatif pada lingkungan, pendidikan, kesehatan serta tata kelola negara<sup>3</sup>. Perubahan struktural pada ekonomi global yang berlangsung sejak tahun 1970 menuju 1990-an telah memberikan perubahan terhadap hadirnya ‘ekonomi baru’ yang didasarkan pada ‘mode baru pembangunan, informasi dan jaringan’. Metode ini menjadi atribut yang penting’.

Teknologi, informasi dan komunikasi memang telah membuat masyarakat lebih efisien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan kehadiran teknologi baru berupa internet yang dianggap sebagai salah satu penunjang kehidupan ekonomi pada masyarakat modern. Pada abad ke-20 penciptaan dan pengembangan internet dihasilkan dari perpaduan unik antara strategi militer, kerjasama sains, teknologi kewirausahaan, dan kontra inovasi

---

<sup>3</sup>Maria Pangestu dan Grace Dewi, “Indonesia and the digital economy: creative destruction, opportunities and challenges”, dalam Tapsell, R, & Jurriens, E, *Digital Indonesia : Connectivity and Divergence* (Singapore: ISEAS, 2017), 227.

budaya. Asal-usul Internet terletak pada karya salah satu institusi penelitian paling inovatif di dunia: *the US Defense Department's Advanced Research Projects Agency* (ARPA). Ketika akhir tahun 1950-an, peluncuran Sputnik pertama kali memicu kekhawatiran pendirian militer berteknologi tinggi Amerika Serikat, ARPA melakukan sejumlah inisiatif yang berani, beberapa diantaranya adalah mengubah sejarah teknologi dan mengantarkan era informasi dalam skala yang besar. Selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut, kehadiran teknologi digital memperbolehkan segala macam bentuk pesan termasuk pesan suara, gambar, data, dan jaringan yang terbentuk agar mampu berkomunikasi antar satu sama lain tanpa diawasi dengan pusat kontrol. Universalitas digital dan jaringan murni telah menciptakan suatu kondisi sistem komunikasi teknologi yang horizontal serta komunikasi secara global<sup>4</sup>.

Kehadiran internet telah membawa perubahan secara lebih cepat dan tepat seperti dalam kajian ilmu hubungan internasional. Internet dapat membentuk kerangka kerja untuk menganalisis perubahan –perubahan seperti yang telah dilakukan dalam kegiatan bisnis, tentunya ini akan membantu pemerintah dan aktor-aktor internasional lainnya untuk mengambil keputusan yang strategis berdasarkan kenyataan dan bukan pada pandangan terdahulu tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Prediksi adalah dasar yang buruk dalam suatu perencanaan strategis, namun analisis resiko yang lebih canggih tentang bagaimana kehadiran internet mengubah hubungan internasional dapat membantu memperbaiki keputusan yang bersifat strategis dan menunjukkan bagaimana

---

<sup>4</sup> Manuel Castel , *The Rise Of Network Society: Second edition With a new preface* (United Kingdom: Wiley Blackwell, 2010), 45.



keterlibatan para pelaku internasional dengan lebih baik serta terfokus pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

Pada dekade pertama di abad-21, jumlah populasi di seluruh dunia yang terhubung ke Internet meningkat dari total 350 juta menjadi lebih dari 2 miliar. Pada periode ini juga jumlah pengguna ponsel meningkat dari 750 juta menjadi lebih dari 5 miliar (sekarang lebih dari 6 miliar). Hal ini bisa dilihat bahwa perkembangan internet telah dapat menyebar diberbagai penjuru dunia. Bahkan perkiraan pada tahun 2025, mayoritas penduduk di seluruh dunia akan berada dalam satu generasi. Artinya setiap manusia akan mengunjungi berbagai macam situs dan mengakses segala macam informasi tanpa melakukan filter terlebih dahulu. Dengan kata lain para pengguna internet dapat secara bebas mengakses berbagai macam bentuk informasi. Jika kecepatan dan inovasi teknologi dapat dipertahankan bahkan akan mengalami peningkatan, maka akan diperkirakan sebagian besar penduduk di penjuru dunia atau setara dengan 8 miliar penduduk bumi akan saling terhubung dan terkoneksi dengan internet.

Pada setiap lapisan masyarakat, konektivitas akan terus berlangsung dengan dalih dapat memberikan kemudahan yang cenderung lebih terjangkau dan praktis. Masyarakat di penjuru dunia terus menerus memiliki akses ke jaringan internet nirkabel dan tentunya dapat memberikan segala macam kemudahan-kemudahan yang lebih dari sebelumnya<sup>5</sup>. Dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, telah memungkinkan peningkatan penggunaan komputer secara pribadi dalam multifungsi. Penggunaan internet dan sarana telekomunikasi yang beragam dapat membawa informasi lebih dekat dengan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Eric Schmidt dan Jared Cohen, *The New Digital Age : Reshaping The Future of People,Nations,and Business* (New York : Alfred.Knopf, 2013), 4.

Dengan meningkatnya popularitas internet ini, telah menjadi kekuatan pendorong utama lahirnya fenomena-fenomena baru di berbagai sektor masyarakat. Diantara fenomena-fenomena baru tersebut adalah *e-government*, pemilihan elektronik, *e-commerce*, perang informasi, dan munculnya budaya netizen<sup>6</sup>. Pengenalan teknologi baru ini telah mempengaruhi ekonomi dan masyarakat selama kehadiran sejarah manusia. Digitalisasi membawa perubahan teknologi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini perlu dipersiapkan sebaik-baik mungkin, negara perlu memahami apa itu ekonomi digital dan dampaknya. Tentu saja ini dapat membantu negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan informasi dan bisnis yang dipersiapkan untuk memberikan solusi bagi adanya adopsi inovasi dan teknologi guna melindungi risiko-risiko yang akan terjadi<sup>7</sup>.

Salah satu negara yang memanfaatkan kehadiran internet adalah Indonesia. Pengguna internet di Indonesia yang sebagian besar adalah unit bisnis lokal mulai melirik untuk membuka peluang untuk menjadikan internet sebagai sarana maupun pasar yang besar dan potensial. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional yang bekerja disektor digital dapat membantu memfasilitasi penggunaan internet sebagai penciptaan inovasi baru dalam upaya membantu sistem ekonomi nasional lebih beragam. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan multinasional yang bekerja disektor digital dapat dianggap sebagai kategori perusahaan *over the top*/atau layanan yang menawarkan produk-produk digital melalui jaringan internet.

---

<sup>6</sup> Bae, Young Ja, *Information Technology and the Empowerment of New Actors in International Relations*, dalam *Journal of International and Area Studies*; Seoul 10.2 (Dec 2003): 79-92

<sup>7</sup> Eric Schmidt dan Jared Cohen, *Op.cit.*, hlm 227-228.

Dampak inovasi teknologi terhadap sistem ekonomi telah melahirkan era ekonomi digital yang dapat berpengaruh terhadap negara, masyarakat, maupun bisnis. Bagi negara, kehadiran fenomena ini dapat menjadi tantangan yang nyata terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku ataupun yang akan dikeluarkan nanti, mengingat negara dapat mengambil dan memainkan peran dari berbagai sektor. Salah satunya dalam aspek ekonomi. Walaupun saat ini sebagian negara memiliki peran yang kecil, tetapi peran kecil ini dapat menentukan kesejahteraan masyarakat melalui langkah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

Hadirnya pola negara dalam ekonomi dapat dilihat negara sebagai majikan artinya adalah akibat dari meningkatnya jumlah perusahaan negara dengan sendirinya juga meningkatkan peranannya sebagai majikan (*employer*). Negara sebagai regulator artinya negara tidak hanya diam dan berbuat apa-apa dibidang ekonomi. Ia diberi kekuasaan untuk mengadakan intervensi secara administratif atau secara legislatif untuk mengontrol perilaku aktor-aktor pasar. Dan negara sebagai Redistributor artinya bahwa memang kekayaan tidak dibagi rata dalam masyarakat. Maka negara mempunyai tugas untuk menjalankan dan pemeratakan kekayaan dengan cara penarikan pajak. Dalam negara modern dikenal yang disebut “Pajak Progresif” (*progressive tax*): semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi ia harus membayar pajak<sup>8</sup>.

Bagi masyarakat kehadiran ekonomi digital telah membuat kehidupan sehari-hari lebih efisien, murah serta mudah. Segala macam kebutuhan dapat diperolehnya dalam waktu yang relatif singkat tanpa melihat jarak dan

---

<sup>8</sup> I. Wibowo, Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi, (Yogyakarta: KANISIUS, 2010) , 34-35.

transportasi yang digunakan. Selain itu ekonomi digital dapat membuat perkembangan yang signifikan pada pola bisnis internasional dan hadirnya aktor-aktor baru yang dapat menjalankan sistem ekonomi. Pelaku bisnis dapat mengubah cara pandang terhadap sistem ekonomi yang didasarkan pada teknologi-teknologi terbaru. Sehingga dapat membuka dan menyebarkan informasi bisnis yang dimilikinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Pada dasarnya globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap batas studi dan agenda penelitian dalam kajian hubungan internasional. Globalisasi telah membuat kajian HI yang dahulu kala hanya terbatas pada kajian teritorial negara saja atau *state centris*, menjadi lebih luas dalam melihat aktor-aktor diluar negara atau aktor *non-state* seperti *Multinational Corporation* (MNC), *Inter-governmental Organization* (IGO), *Non-governmental Organization* (NGO) maupun Individu yang dapat memberikan cara baru dalam menyelesaikan dan keterlibatan disegala macam aktifitas ataupun permasalahan dalam kajian hubungan internasional. Salah satu aktor *non-state* yang menyebar keseluruh dunia adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau biasa disebut dengan *Multinational Corporations* (MNC) yang menjalankan aktifitas bisnisnya di seluruh penjuru dunia.

Aktifitas bisnis yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini cenderung menyebarkan teknologi dan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara maju ke negara-negara yang sedang berkembang. MNC merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi politik internasional. Sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional, MNC telah

muncul sekurang-kurangnya sejak perang dunia kedua berakhir. MNC merupakan unit ekonomi sekaligus aktor hubungan internasional, yang memiliki aset atau kekayaan jauh lebih besar dari yang dimiliki negara-bangsa. Meluasnya MNC ke seluruh pelosok dunia tidak mungkin terjadi tanpa dukungan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Teknologi, Informasi, dan komunikasi telah mengubah hubungan antar manusia sedemikian rupa sehingga rintangan ruang dan waktu menjadi sangat relatif. Kemajuan di bidang komunikasi ini merupakan dukungan vital bagi meluasnya kerja MNC. Gerak MNC dan kemajuan dibidang teknologi serta komunikasi memang pilar utama dalam globalisasi<sup>9</sup>.

Di abad-21 MNC telah bertransformasi terkait dengan hadirnya inovasi teknologi dan komunikasi yang membuat efisiensi dan sinergi lebih besar dalam manajemen dan operasi, selain itu juga dapat membuat MNC dalam menjalankan hubungan bisnis menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap pasar. Aliran perdagangan yang dilakukan semakin digital. Sehingga produk-produk yang dihasilkan menjadi digital dan dapat membantu kehidupan ekonomi pada masyarakat modern.

Globalisasi produksi benar-benar sudah menjadi fenomena yang tidak dapat ditolak lagi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki markas di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang<sup>10</sup>. Perusahaan-perusahaan besar ini telah melakukan ekspansi diberbagai negara. Ketidakseimbangan yang terjadi bagi negara dalam menghadapi globalisasi ekonomi, telah memicu sejumlah permasalahan yang dapat berpengaruh pada perkembangan negara, salah satunya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.12-13.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.61.

pada pola pendapatan negara. Beberapa perusahaan yang pada umumnya bermarkas di Amerika Serikat seperti Starbuck, Amazon, dan Google telah melakukan ekspansinya diberbagai pelosok negara dan cenderung memiliki sistem perpajakan yang cukup rumit bagi negara tuan rumah. Dengan sistem perpajakan yang cukup rumit, tentu saja dapat memicu adanya indikasi taktik penghindaran pajak.

Kejadian ini memang merupakan hal yang biasa dalam dunia bisnis, tetapi dianggap tidak etis atau melanggar etika. Salah satu perusahaan digital asing yang terus melakukan inovasi adalah Google. Google merupakan sebuah perusahaan asing digital milik Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk layanan pada jaringan internet. Produk-produk tersebut meliputi mesin pencarian, perangkat lunak, dan periklanan daring. Laba sebagian besarnya berasal dari *AdWords*.

Perkembangan bisnis internasional di sektor digital, dapat menjadi celah buat para pemilik perusahaan asing untuk meminimalisir atau melanggar aturan yang berlaku di negara tuan rumah. Salah satu contohnya adalah proses pemajakan terhadap Google yang memang memiliki struktur pemajakan yang cukup rumit. Selain situs pencari, Google telah memiliki produk-produk baru yang dapat ditawarkan kepada para pelaku bisnis lokal dan masyarakat modern khususnya dalam operasi pemasangan iklan dalam situs pencari mereka.

Masyarakat Indonesia dapat menjadikan Google sebagai pasar yang potensial khususnya dalam penggunaan jasa periklanan secara digital. Tetapi, kehadiran perusahaan digital ini telah mengakibatkan permasalahan yang cukup

besar dalam penerimaan pajak negara. Sistem yang cukup rumit membuat sulit terdeteksinya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Google.

Fenomena upaya “Taktik Penghindaran Pajak” terhadap negara setempat seperti yang terjadi di Inggris, Perancis, Italia dan Indonesia telah memberikan contoh terhadap perkembangan bisnis internasional dan inovasi teknologi dalam sistem ekonomi. Sehingga memicu maraknya praktek bisnis digital internasional untuk berupaya meminimalisir kewajiban terhadap negara *host-country*. Ini menjadi salah satu tantangan bagi setiap negara untuk perlu meninjau kembali dan berupaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang berlaku sehingga kejadian serupa dapat di minimalisir.

Salah satu kebijakan yang perlu dilihat kembali terkait dengan fenomena-fenomena diatas adalah kebijakan fiskal negara yang dimana bertujuan untuk memberikan pemasukan bagi negara dan tujuan akhirnya dapat didistribusikan kepada masyarakat guna menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam kebijakan fiskal ada beberapa macam atau cara untuk menggerakkan perekonomian suatu negara salah satu nya adalah sistem penggunaan pajak. Hal ini menjadikan tinggi rendahnya pajak dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi objek tempat dimana perusahaan-perusahaan asing yang berbasis IT dunia beroperasi. Oleh karena itu, Indonesia dalam menyongsong kehadiran era ekonomi digital yang semakin berkembang, pemerintah menyusun visi dan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, dengan ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang muncul salah satunya adalah

kebijakan likuiditas pasar bagi perusahaan-perusahaan *star-up* serta kebijakan baru yang harus memiliki Badan Usaha Tetap di Indonesia. Seperti halnya apa yang dihadapi oleh Google di Indonesia yang mengalami permasalahan kepemilikan BUT dan berdampak pada sistem pembayaran pajak terhadap negara Indonesia.

Sebagai perusahaan raksasa berbasis IT yang bermarkas di Amerika Serikat, Google telah diindikasikan mengalami penunggakan dan upaya penghindaran pajak di berbagai negara, salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia, Google dinilai melakukan pemanfaatan celah undang-undang nasional, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kepemilikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar sebagai subyek pajak nasional dan luar negeri. Google dapat dikategorikan sebagai penyedia layanan konten melalui internet (*over the top/OTT*) dan PT Google Indonesia juga sudah menempati dan memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia sejak tahun 2011. Tetapi Google Indonesia hanya beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT).

Dengan demikian, Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPh-nya. Wajib pajak dalam negara Indonesia merupakan subjek pajak yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) Pasal 2: Salah satunya adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT merupakan bagian dari perusahaan subjek pajak luar negeri, diperlukan sebagai kriteria pemajakan atas penghasilan usaha lintas batas bagi negara sumber. BUT ini mencakup Cabang perusahaan, Kantor perwakilan, maupun Gedung kantor<sup>11</sup>. PT Google Indonesia

---

<sup>11</sup> Gunadi, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, (Jakarta: MUC Consulting Group, 2013), 7-11



berada di Sentral Senayan II, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Kantor perwakilan tersebut mulai ditempati Google sejak tahun 2013<sup>12</sup>.

Sedangkan apabila wajib pajak luar negeri Non-BUT tetap akan dikenakan pajak sesuai dengan UUPPh pasal 26 (1), Pasal 26 (2), Pasal 26 (2A) wajib pajak dilakukan hanya melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Tetapi, harus dilihat kembali dengan pemanfaatan dari ketentuan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan negara-negara yang menyepakati perjanjian-perjanjian tersebut. P3B ini berarti bahwa pemotongan PPh terkait pasal diatas juga harus memperhatikan ketentuan P3B. Apakah memang Indonesia sebagai negara tuan rumah atau sumber berhak memajaki penghasilan bagi suatu badan usaha, jika berhak tetap dilihat lagi apakah ada pembatasan mengenai pajaknya. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan ini tetap memerhatikan ketentuan perjanjian internasional yang dimana memiliki sifat *Lex Specialis*.

Perusahaan-perusahaan asing pada hakikatnya merupakan sebuah predator yang imrealistik, karena mereka melakukan eksploitasi banyak dinegara-negara demi keuntungan dan penumpukan modal mereka sendiri. Di ranah

---

<sup>12</sup> “Masalah Pajak Yang Membelit Google di Indonesia” yang diakses melalui <http://teknokompas.com/read/2016/09/19/09153207/masalah.pajak.yang.membelit.google.di.indonesia.Yang> diakses pada tanggal 19/09/2016,pukul 09:15 WIB

ekonomi, internet memang telah merevolusi cara perusahaan melakukan bisnis melalui pengenalan *e-commerce*. Internet telah mempercepat pertukaran informasi dan menurunkan biaya transaksi yang terkait dengan transfer informasi<sup>13</sup>.

Kehadiran era globalisasi ekonomi, *knowledge economy* dan ekonomi digital telah membuat negara saling berintegrasi antar satu sama lain dalam sistem internasional, sehingga dapat menjadi tantangan baru bagi negara untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berlaku bahkan proses penyesuaian kebijakan segera diupayakan, sehingga hal-hal yang sebelumnya telah terjadi dapat di minimalisir.

Fenomena yang terjadi terhadap Google, dapat dijadikan sebagai momentum bagi setiap negara khususnya Indonesia untuk melihat dan menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya dalam aspek regulasi dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain terkait dengan perpajakan penghasilan terhadap suatu badan usaha internasional yang berkategori sebagai *over the top* yang beroperasi di Indonesia sehingga tidak ada celah untuk tidak mematuhi regulasi yang berlaku.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Era globalisasi telah membuat sistem perekonomian negara-negara di dunia menjadi lebih terbuka, bebas dan saling berintegrasi antar satu sama lain. Tidak ada lagi sekat-sekat pembatas bagi negara untuk melakukan proses ekonomi khususnya dalam sistem transaksinya. Kehadiran era digital telah memicu terjadinya polarisasi teknologi yang di mana negara-negara termasuk dalam *super*

---

<sup>13</sup> Bae, Young Ja, Op.Cit. 79-92.

*power* akan semakin meningkatkan kekuatannya dalam memproduksi teknologi dan informasi sedangkan negara-negara yang berada dalam kategori *low-county* atau negara-negara berkembang akan semakin kesulitan untuk mengantisipasi kekuatan yang hadir, sehingga akan memicu terjadinya ketidakseimbangan serta memberikan efek besar terhadap sebagian negara di dunia ini.

Pada dasarnya ketidakseimbangan ini akan menghasilkan kesulitan dalam bersaing bagi beberapa negara, khususnya dalam upaya penerimaan dan penyebaran informasi, teknologi dan komunikasi. Akibatnya beberapa negara akan mengalami *culture shock* artinya negara-negara yang menjadi tempat tujuan para perusahaan besar dapat memainkan peran tanpa adanya kontrol yang utuh dari pemerintah setempat.

Globalisasi ekonomi memang telah membuat sistem ekonomi lebih beragam. Salah satunya adalah kehadiran aspek *knowledge economy* yang membuat hubungan signifikan antara perkembangan ilmu pengetahuan terhadap sistem ekonomi. Selain itu hadirnya fenomena lain juga ikut memberikan keberagaman dalam berkembang pesatnya inovasi TIK dengan kemunculan era ekonomi digital sebagai keterkaitan antara kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan aspek ekonomi. Fenomena ini tentu akan menjadi peluang maupun tantangan bagi setiap elemen. Bagi negara, kemunculan ekonomi digital dapat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penentuan serta peninjauan kebijakan-kebijakan yang diterapkan sehingga dapat terintegrasi dengan sistem internasional. Bagi masyarakat, hal ini menjadi alternatif kemudahan dan efisien dalam memperoleh segala macam kebutuhan sehari-hari khususnya dalam era masyarakat modern. Sedangkan bagi bisnis, ini menjadi potensi dan peluang

dalam upaya perkembangan bisnis internasional khususnya dalam menciptakan berbagai model dan produk-produk baru yang berbasis digital.

Dalam upaya menghadapi era tersebut, negara sebagai pembuat regulasi tentu saja dituntut untuk terus melakukan pembuatan maupun penyesuaian-penyesuaian segala macam kebijakan sehingga dapat meminimalisir munculnya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi negara setempat. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dengan adanya upaya meminimalisir pembayaran pajak penghasilan terhadap negara dan jumlah pembayaran yang tidak sebanding dengan pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku baru khususnya dalam era digital. Penggunaan struktur pajak yang cukup rumit dapat menjadi celah untuk dapat meminimalisir pembayaran pajak terhadap negara tuan rumah. Lemahnya regulasi ekonomi setempat serta adanya keterikatan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu dapat menjadi salah satu penyebab kejadian ini sulit untuk dihindari.

Beberapa perusahaan besar yang bermarkas di Amerika Serikat seperti Google, Starbuck, dan Amazon telah menjadi contoh kehebatan dan kecanggihan globalisasi di bidang ekonomi. Kejadian ini telah memberikan gambaran bahwa perkembangan pesat dari bisnis internasional telah menjadikan pembelajaran terhadap setiap negara untuk lebih teliti dalam segala bentuk pengawasan kepada para perilaku bisnis khususnya dalam pembuatan dan penyesuaian kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan globalisasi. Selain itu perluasan defenisi dari *Multinational Corporations* (MNC) yang tidak hanya menghasilkan produk-produk secara fisik saja, tetapi juga pada model dan produk-produk yang berbasis digital, dapat menjadi bukti perubahan MNC

diabad-21 yang semakin mengikutsertakan inovasi teknologi dalam perkembangannya.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi sebuah fenomena ekonomi baru yang merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada sistem perekonomian. Era ekonomi digital dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang berlaku dalam negara. Salah satunya negara Indonesia yang perlu menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya kebijakan fiskal yang terkait dengan penarikan pajak penghasilan terhadap suatu badan usaha internasional yang bekerja dalam sektor digital atau yang berkategori *Over The Top* (OTT) lintas negara dan bukan hanya fokus terhadap perusahaan-perusahaan yang berbentuk fisik saja. Permasalahan yang di hadapi Indonesia terhadap sistem pemajakan Google, menjadi salah satu contoh kasus yang mengubah cara pandang terhadap proses pemajakan yang dilakukan oleh negara. Sehingga pada akhirnya terjadi proses negosiasi yang panjang oleh kedua belah pihak agar menadapat titik terang dan dapat di pajaki secara efektif.

Fenomena ini telah membuat pemerintah untuk berupaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan ekonomi nasional terkait dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga dapat meminimalisir kasus serupa agar tidak terjadi lagi dan menjadi acuan agar tercapainya visi dan misi Indonesia dalam ekonomi digital di tahun 2020.

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi penelitian dalam jangka waktu 2016-2017, hal ini dikarenakan Google berindikasi mengalami penunggakan pembayaran pajak dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan terkait pajak penghasilan selama beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini telah memberikan respon pemerintah Indonesia melalui penyesuaian regulasi terhadap penetapan wajib pajak luar negeri berupa Badan Usaha Tetap (BUT) terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang bekerja di sektor digital.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Perkembangan ekonomi digital telah memberikan tantangan baru bagi negara dalam upaya proses penyesuaian kebijakan ekonomi. Kehadiran berbagai perusahaan multinasional yang bekerja di bidang digital tentu menjadi bukti dari kemajuan era ekonomi digital. Salah satu hal yang menarik untuk diteliti adalah proses pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut terhadap negara tuan rumah, salah satu contohnya adalah kasus pemajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Google. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

**Bagaimana Implikasi Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap  
Kebijakan Fiskal di Indonesia ? Studi Kasus Pajak Penghasilan  
Google di Indonesia.**

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perkembangan globalisasi dari perspektif ekonomi khususnya kehadiran era ekonomi digital yang dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan nasional.
- b. Untuk menganalisis kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh negara Indonesia khususnya pada UUPPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang terkait dengan pemajakan subjek pajak luar negeri.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini maka penulis memberikan 2 manfaat yaitu :

##### **Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang pembelajaran Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam konsentrasi Ekonomi Politik Internasional.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam kajian ilmiah mengenai upaya pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

##### **Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai pengaruh globalisasi ekonomi dan ekonomi digital terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negara khususnya terkait pemajakan penghasilan bagi subjek pajak luar negeri yang bekerja di sektor digital.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pemerintahan

1. Sebagai masukan yang bersifat membangun guna meningkatkan pemahaman mengenai perumusan, analisis bahkan mereformasi kembali kebijakan-kebijakan nasional yang lebih terperinci khususnya dalam aspek ekonomi terkait dengan penyesuaian regulasi pajak penghasilan bagi badan usaha luar negeri yang bekerja di bidang digital.
2. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya Ilmu Hubungan Internasional dan Lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia terkait sebagai upaya tambahan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Indonesia khususnya mengenai upaya memajaki wajib pajak luar negeri yang bekerja di sektor digital.



## 1.4. Landasan Teori

Untuk menjawab perumusan masalah diatas, maka penulis akan membahas mengenai beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori dan konsep tersebut adalah sebagai berikut:

### *1.4.1. Konstruktivisme*

Konstruktivisme ditandai dengan penekanan pada pentingnya struktur normatif dan material tentang adanya peran identitas yang membentuk aksi politik dan pada hubungan saling konstitutif antara agen dan struktur<sup>14</sup>. Konstruktivisme pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu ‘konstruksi sosial’, yakni proses dialektika antara ‘struktur’ dan ‘agen’, di mana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik<sup>15</sup>.

Ada sekurang-kurangnya dua pemikiran dalam teori konstruktivis yang relevan bagi studi HI. Pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang mempersatukan umat manusia lebih ditentukan oleh “*Shared Ideas*” yaitu gagasan yang diyakini bersama daripada kekuatan material. Kedua, keyakinan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor tertentu dibentuk oleh *shared idea* tersebut, dan bukannya dibentuk oleh peristiwa alam semesta. Artinya, tindakan aktor yang dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa politik tertentu bukan semata-mata karena dimaksud, intensi, dan motivasi dari individu yang bersangkutan, tetapi lebih merupakan hasil

---

<sup>14</sup> Scott Burchill dkk, *Theories of International Relations* (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005), 188.

<sup>15</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Relations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

proses interaksi antara individu tersebut dengan lingkungan disekitarnya baik itu struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Konstruktivisme telah memberikan sumbangan penting bagi perkembangan studi HI, terutama dari sisi pembukaan kemungkinan perluasan bahasan tentang aktor-aktor studi HI yang tidak lagi harus didominasi oleh lembaga-lembaga internasional dan negara<sup>16</sup>. Fokus konstruktivisme sosial atau konstruktivisme adalah pada kesadaran manusia atau kesadaran dan tempatnya dalam urusan dunia. Mereka berpendapat bahwa aspek hubungan internasional yang paling penting adalah sosial, bukan material. Dalam kajian hubungan internasional konstruktivis yang singkat dan selektif ini dengan kontribusi Wendt. Analisis Wendt bersifat sistemik; ia memfokuskan pada interaksi di antar negara-negara dalam sistem internasional dan mengabaikan peran faktor domestik. Norma-norma masyarakat internasional dan cara di mana mereka memengaruhi identitas dan kepentingan negara. Perilaku negara didefenisikan oleh identitas dan kepentingan. Identitas dan kepentingan didefenisiakan dengan kekuatan internasional, yaitu dengan norma-norma perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional.

Para pakar konstruktivis sistemik seperti Finnemore dan Wendt menekankan pentingnya lingkungan internasional dalam membentuk identitas negara. Pakar konstruktivis lain lebih memberikan penekanan pada

---

<sup>16</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme". Dalam Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 20-22.

lingkungan domestik<sup>17</sup>. Konstruktivisme memungkinkan kita untuk mengidentifikasi aktor non-negara sebagai "agen" yang membawa serta "gagasan" yang penting dalam membentuk kebijakan negara.

Konstruktivisme juga mengingatkan kita pada perubahan sikap dan pendekatan yang jelas dalam dan antar negara yang memungkinkan terjadinya gagasan untuk menemukan jalan dalam kebijakan konkrit. Gagasan ini telah menambah dinamika aktor negara dan sampai batas tertentu, aktor non-negara terlibat dalam proses yang membawa pemahaman intersubjektif tentang bagaimana reaksi antar negara harus dilakukan<sup>18</sup>. Jadi pandangan konstruktivis setiap tindakan negara berdasarkan sistem internasional. Artinya setiap tindakan negara dapat berpengaruh pada sistem internasional begitu pula sebaliknya sistem juga dapat memberi pengaruh bagi perilaku-perilaku negara.

#### ***1.4.2. Konsep 'Knowledge Economy'***

Istilah "*knowledge-based economy*" dihasilkan dari peranan penting antara pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya pengetahuan merupakan hal yang terkandung dalam manusia "modal manusia" sedangkan teknologi selalu menjadi pusat perkembangan ekonomi<sup>19</sup>.

Selama beberapa dekade terakhir, kemajuan ekonomi di negara maju telah di dorong oleh kehadiran teknologi yang didasarkan pada

---

<sup>17</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Op. Cit.*, hlm.365-381.

<sup>18</sup>Mely Cabarelo-Anthony, *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), 158.

<sup>19</sup>GENERAL DISTRIBUTION OCDE/GD(96)102 "*THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY* (Paris, 1996), 9.

pengetahuan berbasis penyebaran produksi informasi. Kehadiran Teknologi baru ini muncul pada akhir 1950-an, dengan berkembangnya komputer pribadi kemudian ditandai dengan meluasnya penggunaan *email*. Hal ini membuat eksistensi internet berpotensi besar untuk mereformasi segala bentuk pekerjaan dan sistem ekonomi<sup>20</sup>. Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah banyak membawa perubahan bagi berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dan menghasilkan manfaat yang lebih lanjut. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi diharuskan untuk mengambil tindakan dalam upaya memfasilitasi penyesuaian terhadap sistem internasional.

#### ***1.4.3. Kebijakan Publik***

##### **Pengertian Kebijakan Publik**

Defenisi kebijakan publik yang kendati cukup akurat dalam menjelaskan hal-hal berkaitan langsung dengan kebijakan publik, tetapi cakupannya terlalu luas, ialah defenisi Eyestone yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment* (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya)”.

Demikian pula defenisi yang dipaparkan oleh Wilson yang merumuskan kebijakan publik sebagai: “*The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what*

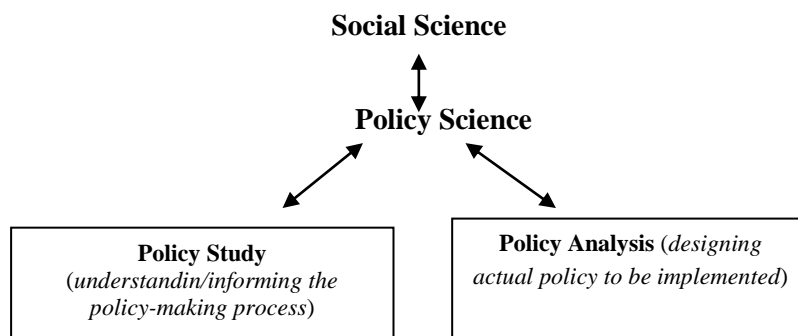
---

<sup>20</sup> Walter. W. Powell dan Kaisa Snellman, “*THE KNOWLEDGE ECONOMY*”, *Annu. Rev. Sociol.* 2004.30:199-220. Downloaded from arjournals.annualreviews.org by Stanford Univ. Robert Crown law Lib. on 06/01/06. School of Education and Department of Sociology Stanford University, 2004, hlm.199.

*happens (or does not happen)*” (tindakan-tindakan tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).

Defenisi lain, yang tak kalah luasnya, dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang menyatakan kebijakan publik ialah “ *whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah)<sup>21</sup>.

**Gambar 1.1.** Cabang Besar Ilmu Kebijakan



Sumber: Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal.34.

### **Tujuan Kebijakan Publik**

Pada dasarnya kebijakan, tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Men-distribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara.

<sup>21</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 13-14.

2. Mengatur (regulatif) versus membebaskan (deregulatif).
3. Men-dinamisasi versus men-stabilisasi.
4. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat pasar<sup>22</sup>.

### **Jenis-jenis kebijakan publik**

Kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi kebijakan menurut sektor yang diatur, atau kebijakan sektoral dan kebijakan menurut area yang diatur, atau kebijakan kewilayahaan. Kebijakan publik secara sektor adalah kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang yang diatur oleh kebijakan tersebut. Setidaknya terdapat empat sektor utama dari kebijakan publik. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Kebijakan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

1. Kebijakan di sektor, atau kebijakan industri. Tidak ada negara maju yang tidak berbasiskan industri atau sektor rill, termasuk di dalamnya industri pengolahan atau manufaktur.
2. Kebijakan moneter dan perbankan, yang berkenaan dengan pengaturan siklus dan sirkulasi mata uang sebagai alat pembayaran ataupun komoditas yang ditansaksikan.
3. Kebijakan keuangan dan perpajakan, yang termasuk disini adalah semua pendapatan negara, khususnya dari pajak, dan di luar itu adalah pendapatan BUMN, hibah, hingga utang, baik dalam maupun diluar negeri. Kebijakan perpajakan Indonesia berhenti pada dua isu: meningkatkan jumlah wajib pajak dan *Tax Amnesty*. Hari ini, isu

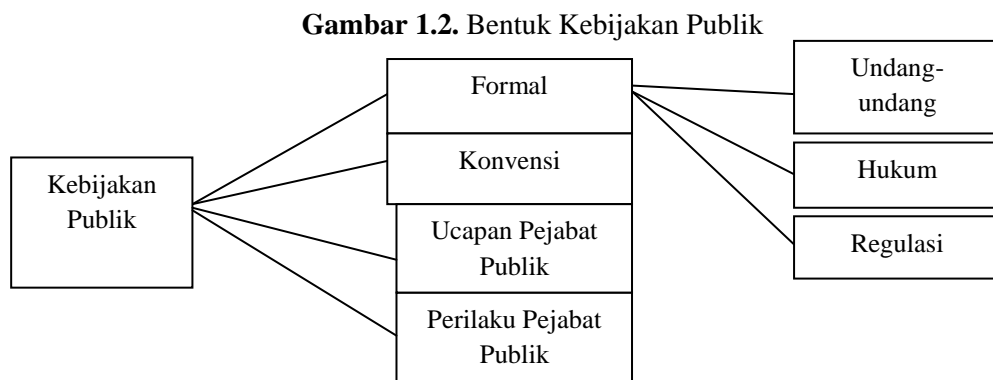
---

<sup>22</sup> Riant Nugroho, Public Policy Edisi 6 ( Jakarta: Pt Gramedia, 2017), 170.

terpenting adalah merenegosiasi *tax treaty* agar investor luar negeri yang menanamkan modal dan mendapat keuntungan serta kekayaan di Indonesia membayar ke kas Indonesia, serta tidak memberikan kesepakatan pajak berganda antar-negara, dan tidak membuat porsi pendapatan pajak negara berkurang secara signifikan.

4. Kebijakan perdagangan dan jasa menjadi kebijakan kunci di era glocalisasi, karena semua negara bersaing memperebutkan pasar global<sup>23</sup>.

### Bentuk Kebijakan Publik



Sumber: Rian Nugroho, *Public Policy 6<sup>th</sup>*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017) hal. 126.

Salah satu bentuk kebijakan publik yang formal adalah regulasi. Regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah-sebagai wakil lembaga negara-kepada pihak non-pemerintah, termasuk di dalamnya bisnis dan nirlaba. Regulasi dibuat karena tiga alasan yaitu :

1. Ada aset negara yang dikelola oleh lembaga bisnis.
2. Berupa infrastruktur publik atau utilitas yang bersifat publik atau inklusif yang menghasilkan monopoli(termasuk duapoli atau oligopoli) maupun bukan monopoli.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 110

3. Atau karena keberadaannya memerlukan adanya monopoli (termasuk duopoli atau oligopoli) yang bersifat alami.

Pada saat, kebijakan regulasi disarankan untuk didasarkan kepada empat isu, yaitu :

1. Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak.
2. Monopoli atau oligopoli yang keduanya bersifat alami.
3. Berbasis alokasi kekayaan negara.
4. Berkenaan dengan keselamatan negara.

Regulasi yang bersifat spesifik yang memerlukan keberadaan kebijakan regulasi khusus, bahkan kalau perlu dibentuk komisi regulasi, adalah berkenaan dengan sektor :

1. Energi (listrik, bahan bakar baku)
2. Telekomunikasi (frekuensi, konten, penyadapan, dan satelit)
3. Media Komunikasi ( media massa, internet)
4. Penyiaran (*broadcast* dan konten)
5. Air (air minum/bersih dan air limbah)
6. Transportasi (pelabuhan, bandara, transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat publik/massal, jalan tol)
7. Industri strategis dan keamanan (industri sekuriti, industri militer, dan sejenisnya)



Regulasi mengandung muatan tentang konsensi sektor non-negara atas aset terbatas milik negara. kata kuncinya dalam regulasi adalah apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa banyak, dan berapa lama<sup>24</sup>.

## **Kerangka Analisis Kebijakan**

### **Pengertian Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Suatu deskripsi mengenai analisis kebijakan disajikan oleh E.S. Quade, mantan kepala Departemen Matematika di perusahaan Rand, menyajikan dasar kebijakan untuk mendefinisikan analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah :

*Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.... Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya kedalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih<sup>25</sup>.*

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 126-137.

<sup>25</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction* ( New Jersey: Prentice-Hall,inc, 1994), trj. Samodra Wibawa, dkk, 2003), 95-96.

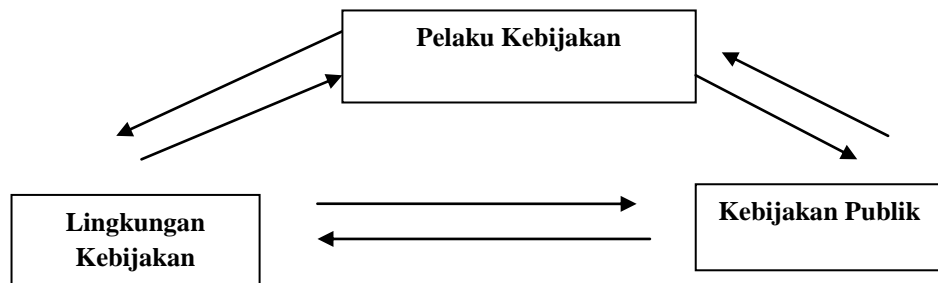
**Tabel 1.1.** Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan

<b>Pendekatan</b>	<b>Pertanyaan Umum</b>	<b>Tipe Informasi</b>
Empiris	Adakah dan Akan adakah ( <i>Fakta</i> )	Deskriptif dan Prediktif
Valuatif	Apa Manfaatnya ( <i>Nilai</i> )	Valuatif
Normatif	Apa yang harus dilakukan ( <i>Prediktif</i> )	Prediktif

*Sumber:* William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction* ( New Jersey: Prentice-Hall,inc, 1994), trj. Samodra Wibawa, dkk, 2003),hal. 98.

Sistem kebijakan adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lainnya di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur yaitu :

**Gambar 1.3.** Elemen Sistem Kebijakan



*Sumber:* Diadaptasi Dari Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 3<sup>rd</sup> ( Englewood Clifs, NJ: Prentice Hhall, 1978), hal. 9.

Defenisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*Policy stakeholder*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang memiliki andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya, kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan

sendiri dan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan Kebijakan yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihak-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan kedalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan. Para analis kebijakan, tidak berbeda dari aktor-aktor kebijakan lainnya, merupakan pencipta dan hasil ciptaan sistem kebijakan<sup>26</sup>.

### **“Teori” Analisis Kebijakan**

Teori analisis kebijakan adalah *lay-theory*. Mengikuti Schermerhorn (1993), teori adalah *a set of concept and ideas that explains and predict physical and social phenomena*. Teori terbagi kepada dua pemahaman yaitu *lay theory* dan *scientific theory*. *Lay theory* adalah teori yang dikembangkan dari pengalaman, atau disebut Schermerhorn sebagai *developed by themselves or learned from others over times and as a result of their experiences*; sementara *scientific theory* adalah teori yang dikembangkan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.109-111.

melalui metode-metode ilmiah, atau *that are developed through scientific methods*. Teori analisis kebijakan, seperti sebagian besar teori-teori manajemen, baik itu sektor publik maupun bisnis, dikembangkan dari *best practices*, yang kemudian diverifikasi, divalidasi, dan kemudian dikodifikasi.

Jadi, analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah. Artinya, teori tentang analisis kebijakan adalah *lay theory*, bukan *academical theory*. Dengan demikian, pengembangan teori analisis kebijakan di masa mendatang akan semakin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi dilingkungan administrasi publik<sup>27</sup>.

#### **1.4.4. Globalisasi dan Kebijakan Publik.**

Dampak globalisasi dapat dilihat dalam beberapa bidang, salah satunya dalam kegiatan negara melalui kebijakan-kebijakan publiknya. Kebijakan publik merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepemilikan otoritasnya serta komitmen terkait dengan sumber daya yang dapat di lihat sebagai suatu permasalahan atau tantangan bagi publik. Ruang lingkup antara globalisasi dan kebijakan publik di nilai besar, mulai dari adanya kebijakan pertahanan luar negeri, kebijakan sosial untuk (kesehatan, pendidikan atau penanganan kejahatan), hingga kebijakan sains dan teknologi yang didalamnya terdapat peraturan berbagai aktivitas-aktivitas mulai dari periklanan hingga eksperimen yang bersifat ilmiah.

---

<sup>27</sup>Riant Nugroho, *Op. cit.*, hlm. 301-302.

Globalisasi dapat menciptakan lingkungan baru bagi kehadiran sebuah fenomena dalam negara. Keterkaitan ini sangat penting mengingat akan menjadi sumber peluang bagi negara atau malah menjadi sumber resiko. Pada umumnya kebijakan terbentuk perlu adanya permasalahan, tetapi bagaimana sesuatu bisa dikatakan sebagai masalah tergantung pada nilai sosial, ideologi dan gagasan yang dominan serta pada kepentingan politiknya. Globalisasi dan kebijakan publik dapat diartikan dengan cara tertentu melalui kerangka tindakan yang mengikutinya, baik itu melalui peraturan, langkah-langkah finansial, keputusan investasi maupun pengeluaran/kesepakatan dagang.

Jika terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui proses kebijakan pemerintah yang melibatkan masalah-masalah terkait globalisasi maka dapat menjadi masalah koherensi seputar nilai-nilai. Bagaimana pemerintah menjalankan kekuatan relatifnya guna untuk dapat membingkai sebuah fenomena seperti kehadiran globalisasi yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah bagi sebagian negara dan tidak sedikit juga menjadi sebuah hal yang sulit bagi negara yang belum siap sedangkan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses-proses globalisasi dinilai sangat besar.

Bagi sebagian pemerintahan, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keuntungan dari perluasan perdagangan yang dihasilkan oleh globalisasi ekonomi. Selain itu bagi sebagian pemerintah lainnya, adanya ekspansi-ekspansi diberbagai bidang bukanlah merupakan sebuah ancaman, hal ini bisa dilihat dengan adanya budaya asli setempat dapat tenggelam oleh produk-produk perusahaan global akibat adanya

homogenisasi dan ‘Amerikanisasi’, atau juga adanya kelangsungan ekonomi beberapa negara yang akan menurun dalam perdagangan dunia. Kehadiran globalisasi ekonomi telah mengubah peran negara dan kebijakan publik yang tidak dapat dibatasi. Disisi lain, kehadiran globalisasi dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi keperluan kebijakan dan infrastruktur kelembagaan. Manfaat ini dapat dilihat dari adanya pertumbuhan perdagangan dunia yang memicu respon kebijakan nasional dengan meningkatkan investasi dibidang pendidikan dan pelatihan. Manfaat ini terkait dengan peningkatan pendapatan kepada masyarakat terdidik dan terlatih dalam pembagian kerja didunia internasional.

Globalisasi pada dasarnya merupakan fenomena yang paradoks dan tidak kalah dengan hadirnya kebijakan publik yang merespon secara integrasi dan harmonisasi, hal ini terbukti di beberapa bidang namun globalisasi juga dapat menciptakan ruang bagi adanya perbedaan dan pembagian. Pada umumnya, di antara negara-negara demokrasi yang telah maju, keterbukaan perdagangan yang lebih besar telah dikaitkan dengan pertumbuhan belanja pemerintah. Ini berarti peningkatan perpajakan perusahaan dan individu sering kali dibantu dengan menggunakan sistem pajak yang lebih luas dan perpajakan perusahaan masih relatif rendah dibandingkan dengan pajak individu secara pribadi. Faktor domestik tetap menjadi signifikan terhadap bagaimana perpajakan pribadi dapat didistribusikan disatu negara manapun,

hal ini dikarenakan adanya kekuatan tenaga kerja yang terorganisir dan kekuatan politik yang mempengaruhi beban pajak<sup>28</sup>.

#### **1.4.5. Perspektif ‘Global Reach’ ( Jangkauan Global)**

Pendekatan *Global Reach* merupakan sikap kritis terhadap Perusahaan Multinasional (PNM). *Global Reach* memandang PMN dalam konteks perekonomian yang tidak seimbang dimana produksi dan distribusi barang maupun jasa di dominasi oleh satu atau beberapa pelaku. Bagi para pendukung perspektif ini, PMN memiliki kecenderungan besar untuk melakukan monopoli dan oligopoli di dalam maupun luar negeri karena ”konglomerasi” merupakan strategi utama mereka. Nama *Global Reach* itu sendiri diberikan oleh para pengamat PMN yang merujuk pada judul buku populer karya Richard Barnet dan Ronald Muller yang memuat asumsi-asumsi dasar perspektif ini. Steve Hymer mengaitkan ekspansi perusahaan ke mancanegara dalam dua hal yaitu untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam penguasaan teknologi dan pasar *vis-a-vis* perusahaan-perusahaan lokal diluar negeri. Dan untuk menghindari persaingan tidak sehat dengan sesama perusahaan besar dalam negeri. Bagi perspektif ini, PMN merupakan kekuatan raksasa yang mengandalkan pada modal besar, penguasaan teknologi, dan diversifikasi produk untuk memperluas sekaligus mengontrol jaringan pasar di seluruh dunia.

*Global Reach* menganggap bahwa kecenderungan PMN untuk melakukan monopoli dan oligopoli membuat mereka lebih tepat untuk

---

<sup>28</sup> Tim Blackman, “Globalization and Public Policy” dalam buku George Ritzer “Globalization”, (Australia: Blackwell Publishing, 2007), 429-441.

dianggap sebagai “penyebab” daripada “penyelamat” perekonomian suatu negara dari jeratan distorsi pasar. Contantine Vaitsos menyatakan bahwa kapasitas PMN untuk menguasai modal dan teknologi telah membuat mereka tampil sebagai kekuatan institusional yang memiliki kecenderungan untuk melakukan monopoli. Dalam kapasitas sebagai kekuatan monopoli inilah, maka PMN memiliki kecenderungan untuk menciptakan distorsi pasar di dalam perekonomian negara tuan rumah. Bagi penganut perspektif ini, sistem operasi PMN membawa beberapa konsekuensi negatif bagi perekonomian negara-negara tuan rumah. Pertama, PMN cenderung untuk lebih menciptakan “konsentrasi” daripada “distribusi” produk yang pada gilirannya dapat menghambat aliran barang.

Konsentrasi produk yang pada gilirannya dapat menghambat aliran barang. Kedua, karena kapasitasnya dalam menguasai pasar, maka PMN cenderung memonopoli keuntungan yang diperolehnya dalam suatu negara. Dengan mengadopsi sistem akuntansi yang kompleks PMN bahkan mampu mengurangi kewajiban pembayaran pajak terhadap negara tuan rumah. Ketiga, secara individual maupun kolektif PMN memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempersempit jalan masuk (*entry point*) bagi perusahaan-perusahaan lokal yang merupakan calon pesaing bagi mereka. Keempat, dengan memanfaatkan kontrol terhadap pasar, PMN cenderung untuk “menciptakan” permintaan bagi produk-produk unggulan mereka dengan tidak memperdulikan preferensi konsumen. Akibatnya, terjadilah proses *taste transfer* (pengalihan cita rasa), yakni suatu kondisi dimana perilaku konsumen didikte oleh PMN untuk melakukan *over-consumption*



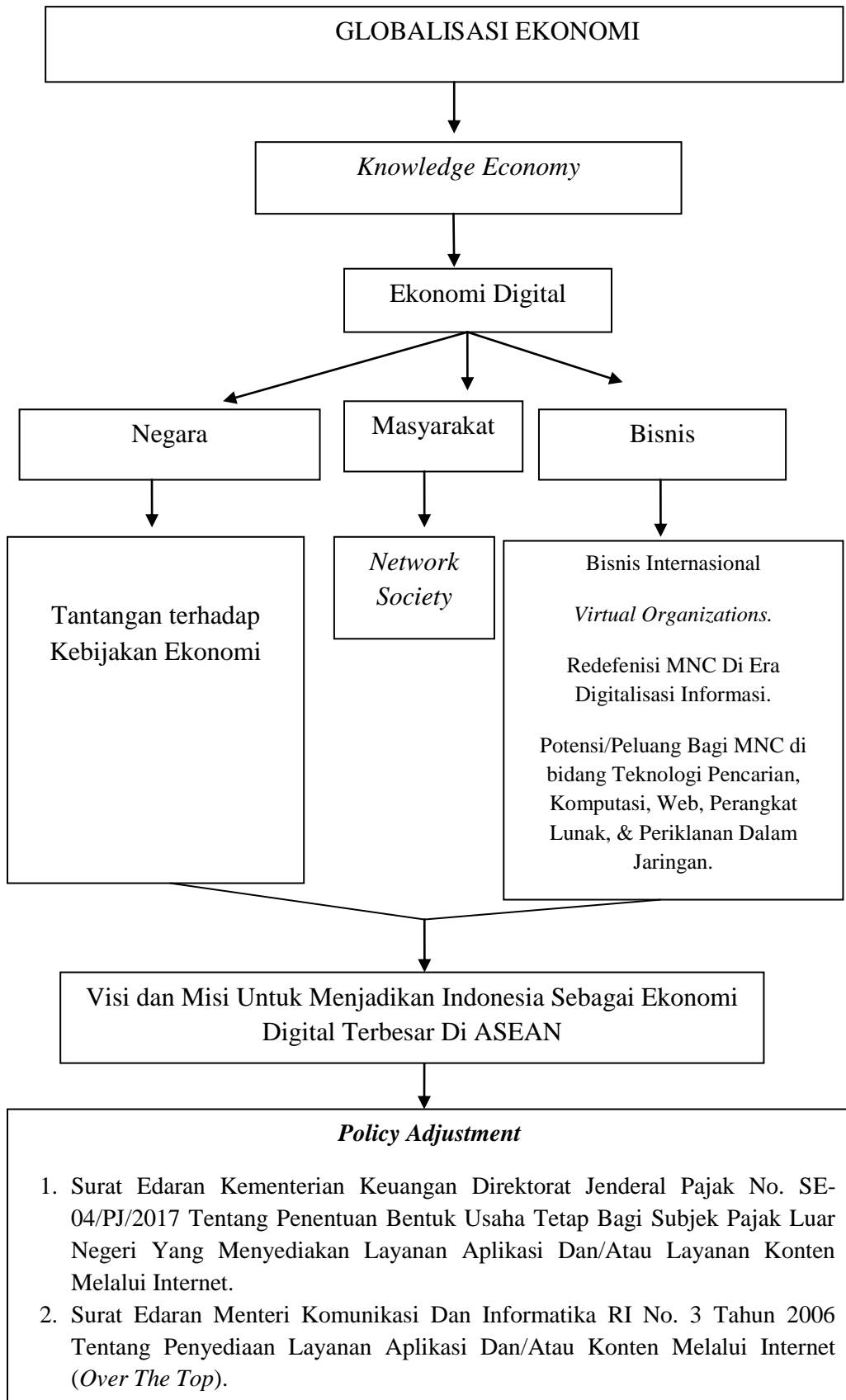
(mengkonsumsi secara berlebihan). Kelima, PMN cenderung menyebabkan terjadinya *factor displacement*, yakni situasi di mana komponen-komponen lokal tidak terpakai di dalam proses produksi. Kecenderungan PMN untuk mempergunakan teknologi canggih yang diadopsi langsung dari negara maju membuat perusahaan subsidiari terpaksa harus tunduk pada keharusan untuk memakai faktor produksi ( bahan baku, sumber daya manusia, alat pemrosesan, dll) yang diimpor dari negara asal PMN tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka para penganut perspektif *Global Reach* merekomendasikan agar negara-negara sedang berkembang tidak segan-segan untuk membatasi kegiatan PMN dengan cara membuat kebijakan yang jelas dan tega dalam mengatur pembagian keuntungan, pembayaran lisensi, pengaturan hak kelola, pembayaran pajak, penggunaan tenaga kerja lokal, pengaturan hak sewa tanah, pembayaran royalti, dan bahkan ketentuan-ketentuan untuk memonitor aktivitas PMN<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, Politik Bisnis Internasional ,( Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 2002), 44-53.

### 1.5. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merujuk pada metode penelitian analisis dokumen dan studi kasus. Secara spesifik penelitian kualitatif menurut John W. Cresswell dapat di definisikan sebagai sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh<sup>30</sup>. Penulis menggunakan metode berbasis dokumen dan berbasis internet. Metode berbasis dokumen disini adalah setiap bahan yang keberadaannya secara independen dari tindakan peneliti.

Oleh karena itu penulis menggunakan dokumen-dokumen yang bersifat sekunder yaitu melalui pencaharian beberapa Jurnal yang terkait dengan topik diatas. Dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Secondary Analysis*. Artinya adalah para peneliti sosial membuat perbedaan antara data yang telah mereka kumpulkan secara pribadi untuk proyek penelitian mereka sendiri atau disebut dengan data primer, dan data yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau yang dikenal dengan data sekunder. Namun, yang dimaksud data sekunder di sini pada dasarnya tidak hanya data

---

<sup>30</sup> Umar Suryadi Bakry, Metode Penelitian Hubungan Internasional, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016),14.

yang dikumpulkan oleh peneliti lain, melainkan juga statistik resmi yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah.

Analisis sekunder (*secondary analysis*) digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian (*research question*) baru maupun untuk meneliti kembali pertanyaan penelitian utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian. Menurut Vogel Hinds (*et al*), tujuan analisis sekunder adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif (*alternative point of review*) atau perspektif baru atas data yang telah terkumpul<sup>31</sup>. Selain itu metode yang digunakan melalui studi kasus yang akan dianalisis. Menurut Robert Yin, Studi kasus merupakan sebuah penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat. Apa yang dimaksud disini adalah bahwa studi kasus dimaksudkan untuk memberikan tingkat kerincian dan pemahaman atas suatu fenomena<sup>32</sup>.

Bersamaan dengan ini juga penulis juga menggunakan metode berbasis internet. Penggunaan internet yang dimaksud adalah hanya mengumpulkan informasi faktual tentang topik ini atau informasi atas peristiwa tertentu yang ingin kita cari<sup>33</sup>. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan dan memanfaatkan situs berita yang tersedia secara bebas.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 199-200

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm., 222.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memperoleh data dari multi-sumber. Yaitu dari beberapa pencaharian baik itu menggunakan beberapa buku, dokumen, artikel, serta jurnal yang di publikasikan melalui situs-situs yang dianggap relevan dengan topik/tema yang diangkat selain itu penulis menggunakan teknik berbasis metode wawancara terstruktur dengan menggunakan script dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Wawancara yang dilakukan dengan Dirjen Perpajakan II Kementerian Keuangan RI pada tanggal 14 Maret 2018 dan lembaga non-pemerintah, *Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA)* pada tanggal 23 Maret 2018.

Data berbasis dokumen menggunakan dokumen berbasis sekunder dan dokumen pribadi artinya penulis memberikan penjelasan sesuai dengan penulis sebelumnya memberikan pemaparan secara singkatnya melalui jurnal atau artikel. Dan pengumpulan data melalui internet didapatkan melalui artikel yang dimuat di halaman Kompas pada tanggal 19 September 2016, BBC Indonesia pada tanggal 13 Juni 2017 dan halaman Tempo pada tanggal 21 September 2016 mengenai adanya pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pajak akan menindak lanjuti upaya penyelidikan penghindaran pajak terhadap perusahaan berbasis teknologi dan komunikasi, PT Google Indonesia dan masalah pajak yang membelit indonesia.

Dalam menulis penelitian ini tidak terlepas dari unsur pengumpulan data. Dalam data tersebut akan di olah dan di analisis oleh penulis hingga menghasilkan sebuah jawaban dari apa yang hendak muncul dalam

pertanyaan dalam penelitian ini. Data analisis disini dimaksudkan adalah bagaimana proses untuk menyediakan sebuah arti, struktur, dan maksud dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Teknik Pengumpulan Data.

### **BAB 2 Globalisasi : Revolusi Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Kemunculan Era Ekonomi Digital**

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai pengaruh kehadiran globalisasi yang membuat kehadiran aktor-aktor baru dalam bidang studi hubungan internasional sehingga memicu cara baru dalam mempelajari HI. Globalisasi juga erat kaitannya dengan berbagai ilmu pengetahuan salah satunya adalah dampak terhadap ekonomi. Di abad-21 erat kaitannya dengan kebangkitan revolusi teknologi yang membuat segala perubahan-perubahan mendasar. Kehadiran teknologi, informasi dan komunikasi telah memberikan dampak terhadap sistem ekonomi yang menghadirkan fenomena-fenomena baru seperti kemunculan era ekonomi digital termasuk bisnis internasional.

### **BAB 3 Google Sebagai Aktor Baru Dalam Bisnis Internasional.**

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang kehadiran aktor-aktor baru dalam perkembangan bisnis internasional yang pesat. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas terkait dengan perubahan-perubahan pandangan mengenai organisasi atau bisnis internasional yang bukan hanya bisa dilakukan secara nyata saja, tetapi melalui penjualan produk-produk digital. Penulis mengambil salah satu contoh perusahaan digital raksasa dunia, Google yang bukan hanya digunakan sebagai mesin pencari saja tetapi seiring perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, Google telah memproduksi produk-produk digital yang bertujuan menunjang kehidupan sosial masyarakat. Selain itu penulis juga akan membahas sejarah, produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Google. Kehadiran layanan periklanan Google menjadi perhatian di Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia membuat pengguna Google banyak digunakan sebagai mesin pencarian dan memanfaatkan produk-produk bisnisnya sebagai pendukung unit bisnis lokal.

### **BAB 4 Analisis Penyesuaian Kebijakan Pajak Penghasilan Badan Usaha Multinasional Di Indonesia.**

Dalam Bab ini penulis memberikan analisis terhadap penyesuaian kebijakan ekonomi yang terkait dengan kebijakan Penarikan Pajak Penghasilan Terhadap Badan Usaha Multinasional yang berkategori *Over The Top* (OTT) di Indonesia dengan menggunakan studi kasus pajak penghasilan Google di Indonesia.

### **BAB 5 Kesimpulan**